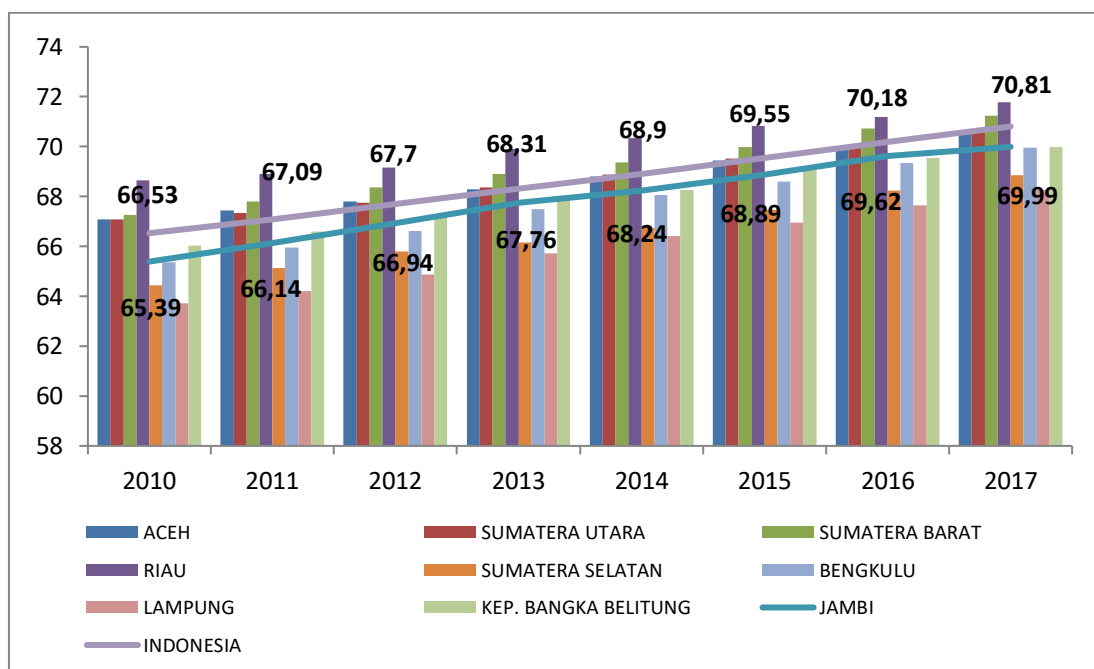


BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

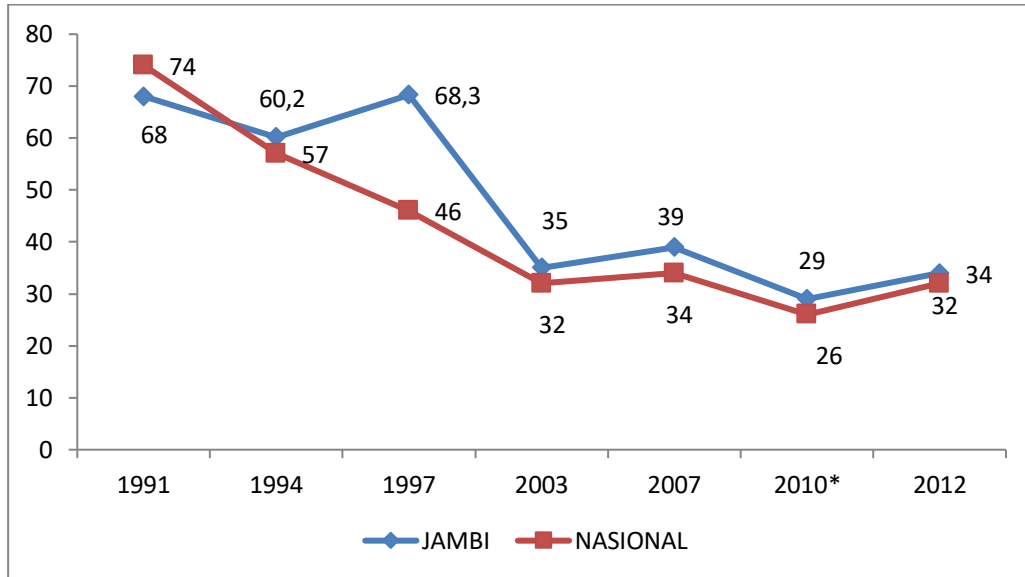
4.1 Permasalahan

- 1 Penerapan e-Government system dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum berjalan maksimal. Sampai dengan tahun 2015, penerapan e-government di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi baru mencapai 48,28% dan masih terdapat gap 52,72% untuk mencapai 100% penerapan e-government di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Padahal untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan e-government akan sangat membantu dan merupakan salah satu *tools* pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2 Kapasitas pendidikan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak merata sehingga kualitas pendidikan dan kesehatan juga tidak merata. Hal ini menjadi salah satu penyebab Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional dan masuk peringkat menengah di Sumatera.



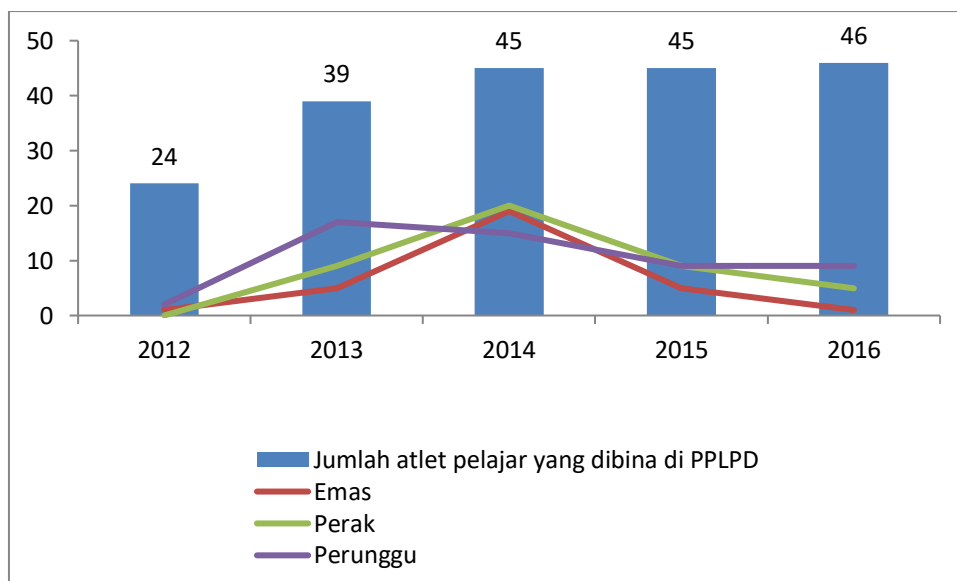
Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi dibandingkan provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2010-2017 (BPS, 2018)

- 3 **Angka kematian bayi di Provinsi Jambi** pada dasarnya memperlihatkan tren penurunan atau memperlihatkan perbaikan kondisi setiap tahunnya dengan gap yang semakin sempit terhadap capaian nasional, namun angka tersebut **masih di atas rata-rata nasional**. Hal ini membutuhkan upaya kedepannya, sehingga dapat lebih baik dari rata-rata nasional.



Gambar 4.2 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi dibandingkan nasional Tahun 1991-2012 (SDKI, 2012)

- 4 Rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya daerah, hal ini terlihat dari kekayaan budaya baik benda maupun tak benda ataupun karya seni lainnya yang tidak dipatenkan. Hal ini akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakuinya.
- 5 **Prestasi olah raga cenderung menurun**, hal ini tidak saja terlihat dari prestasi atlet pelajar yang cenderung menurun meskipun jumlah atlet pelajar yang dibina meningkat jumlahnya, tapi juga terlihat dari peringkat dalam Pekan Olahraga Nasional.



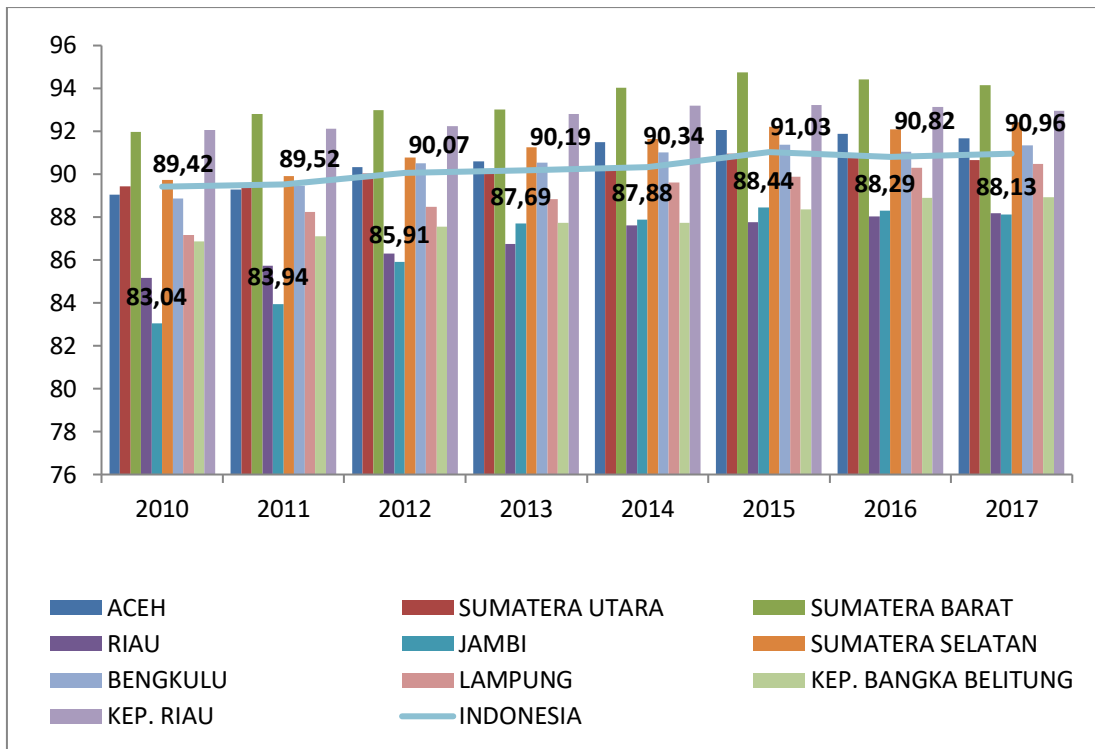
Gambar 4.3 Prestasi atlet pelajar yang dibina di PPLD Tahun 2012-2016 (Dskepora, 2018)

Tabel 4.1 Peringkat Jambi dalam Pekan Olahraga Nasional

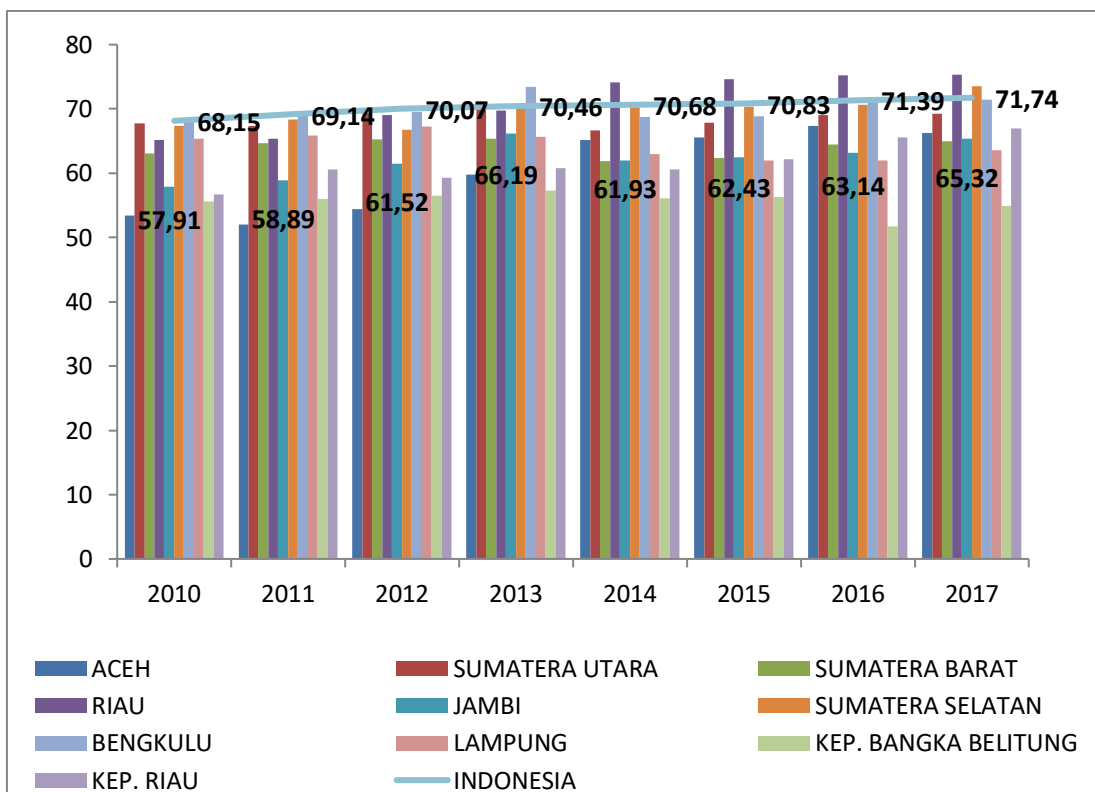
PON	Peringkat	Peroleh medali			
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
XVI/2004	6	27	28	15	70
XVII/2008	15	11	17	28	56
XVIII/2012	24	3	8	20	31
XIX/2016	23	6	6	21	33

Sumber: Diskepora Provinsi Jambi, 2018

- 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih berada di bawah rata-rata nasional. Walaupun memperlihatkan tren yang terus meningkat, namun gap terhadap capaian nasional masih cukup lebar. Bahkan pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi mengalami penurunan, sehingga memperlebar gap. Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi se-Sumatera maka IPG Provinsi Jambi termasuk terendah se-Sumatera, sedangkan IDG Provinsi Jambi berada pada peringkat menengah bila dibandingkan dengan Provinsi lain se-Sumatera.

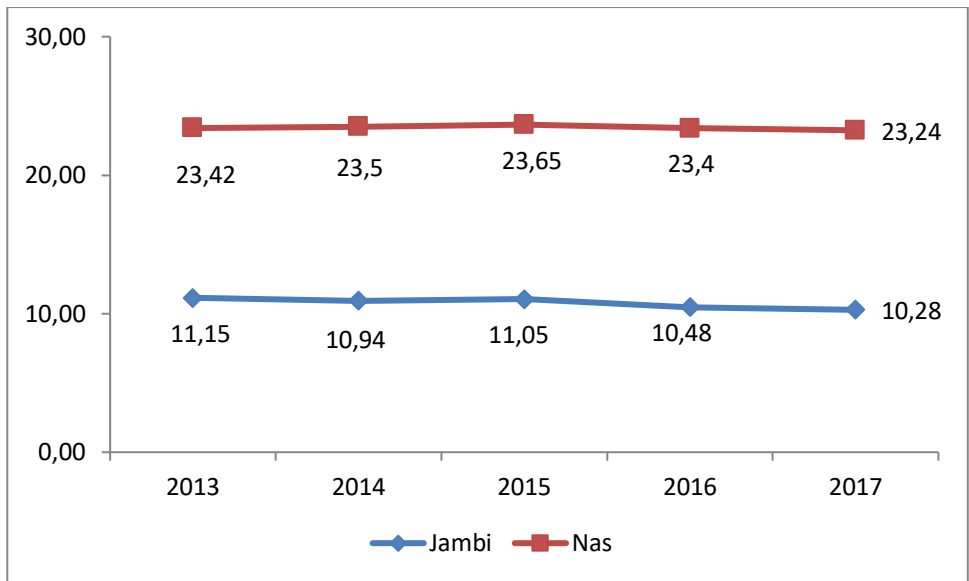


Gambar 4.4 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibandingkan nasional dan Provinsi se-Sumatera Tahun 2010-2017 (BPS, 2018)



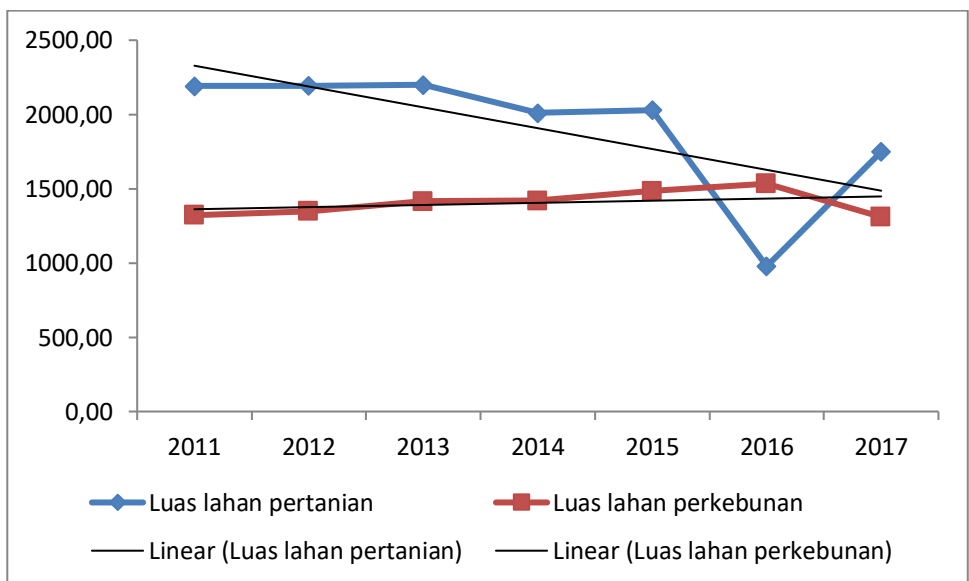
Gambar 4.5 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi dibandingkan nasional dan Provinsi se-Sumatera Tahun 2010-2017 (BPS, 2018)

- 7 Pengangguran terdidik masih cukup tinggi karena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha atau lowongan kerja yang tersedia. Hal ini terlihat dari dominasi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- 8 Penurunan penduduk miskin belum sepadan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi belum berkualitas.
- 9 Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Kurang berkembangnya investasi di Provinsi Jambi mengindikasikan kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Jambi, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, Lemahnya daya dukung infrastruktur, masih rendahnya daya dukung SDM, sistim pelayanan perizinan yang belum standar, belum adanya kepastian jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi.
- 10 Kinerja ekspor yang belum optimal antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), penurunan ekspor produk kayu olahan dan karena keterbatasan bahan baku, berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor Jambi; masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
- 11 Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB terus mengalami penurunan dan berada dibawah capaian nasional



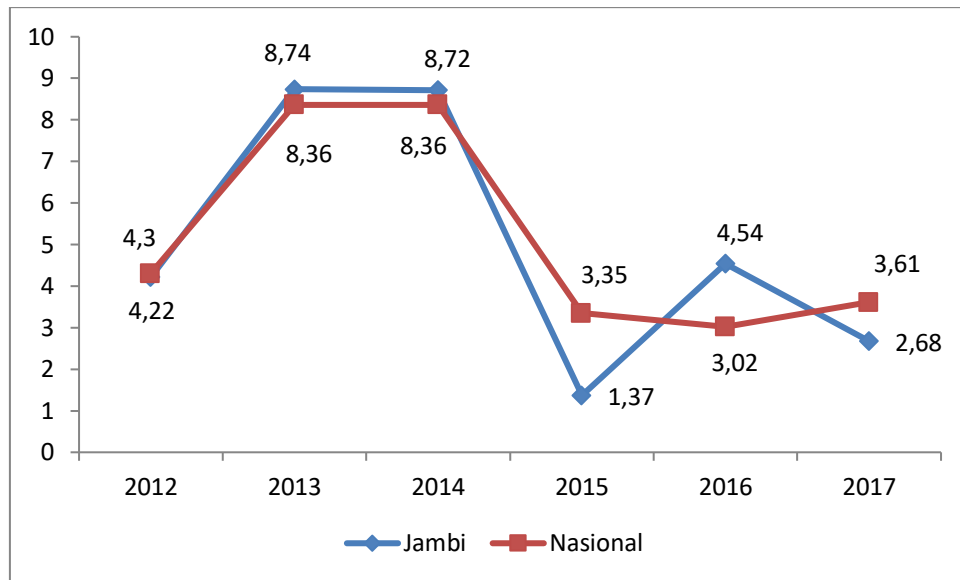
Gambar 4.6 Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Jambi dibanding nasional Tahun 2013-2017 (BPS, 2018)

12 Alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan. Luas lahan pertanian di Provinsi Jambi menunjukkan tren penurunan seiring dengan peningkatan luas lahan perkebunan dalam rentang tahun 2011-2017, walaupun telah terjadi peningkatan luas lahan pertanian pada tahun 2017 sebagai hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya peningkatan lahan perkebunan tidak masalah selama sesuai dengan arahan tata ruang dan tidak mengganggu lahan peruntukan lain, demikian pula penggunaan lahan untuk kepentingan lainnya.



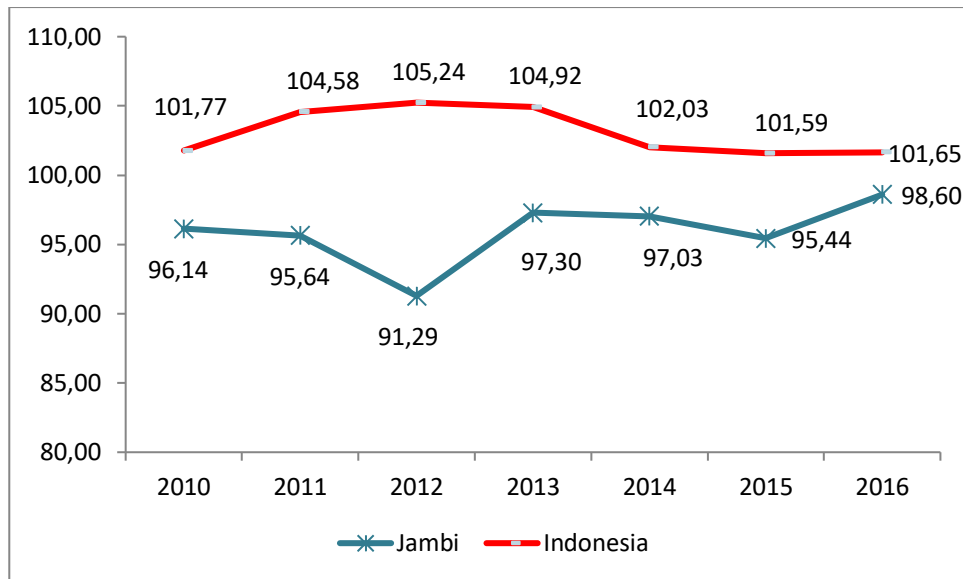
Gambar 4.7 Perkembangan luas lahan pertanian dan perkebunan di Provinsi Jambi, (Dinas Perkebunan, 2018 dan KLHS Perubahan RPJMD, 2018)

13 Inflasi daerah berfluktuatif dan dalam rentang tahun 2012-2017 inflasi Provinsi Jambi lebih tinggi dari nasional, kecuali pada tahun 2012, 2015 dan 2017. Bila dilihat dari kelompok yang mengalami inflasi, maka rata-rata kelompok yang mengalami inflasi setiap tahun adalah kelompok makanan.



Gambar 4.8 Inflasi Provinsi Jambi dibanding nasional (BPS,2018)

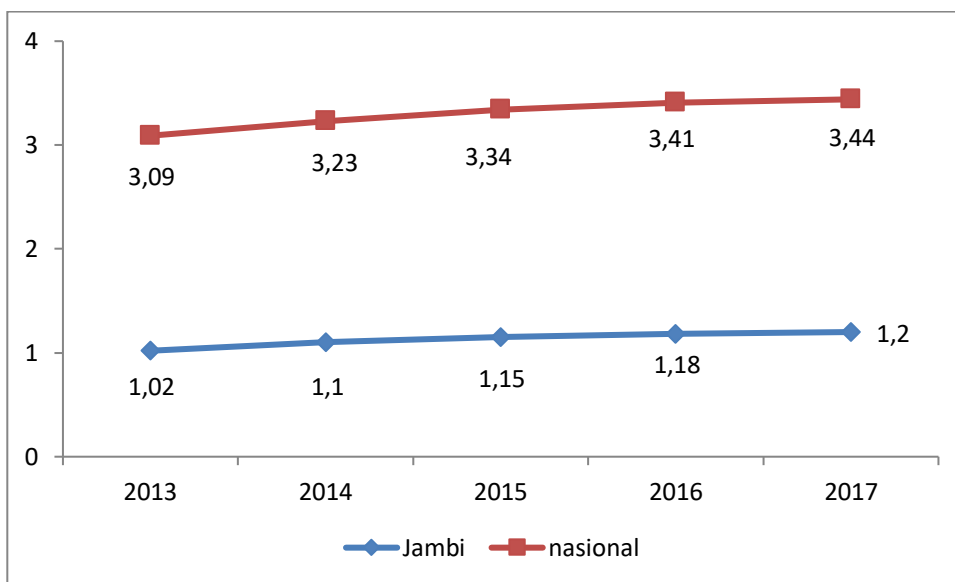
14 Tingkat kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai NTP masih dibawah 100 dan dibawah capaian nasional, sehingga mengakibatkan angka kemiskinan petani masih tinggi.



Gambar 4.9 NTP Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2010-2016 (BPS,2018)

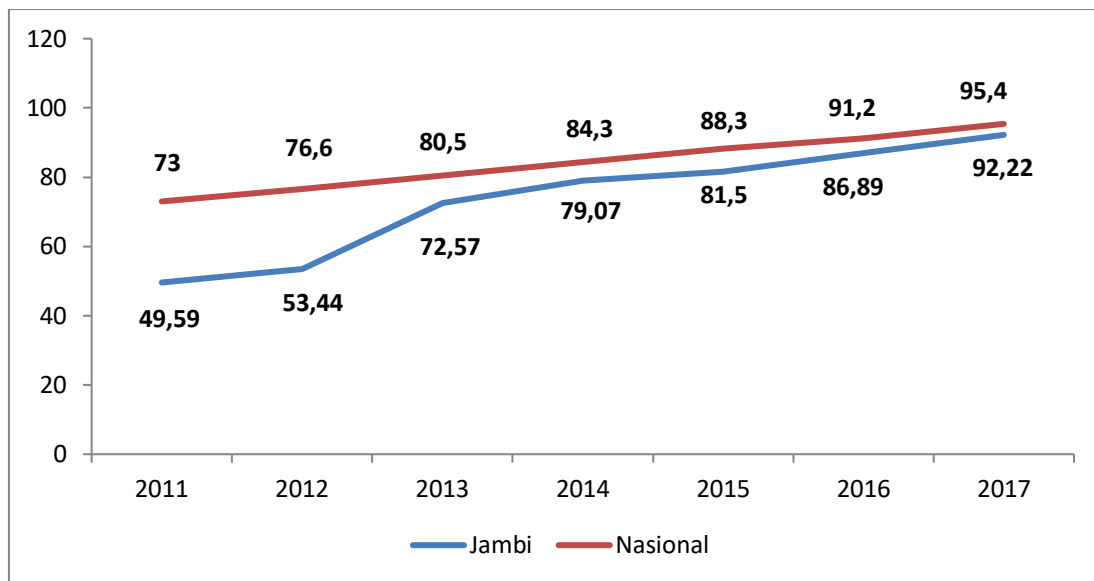
- 15 Belum berkembangnya sektor agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas sektor pertanian. Kendala dalam pengembangan pertanian mencakup, antara lain: (1) Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran; (2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian; (3) Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global; (4) Ketersediaan input produksi pertanian relatif terbatas; (5) Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; (6) Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, serta tata niaga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik.
- 16 Infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum lancar sehingga merendahkan *bargaining position* petani dalam menjual hasil produksinya dan pada sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan faktor produksi di pasar.
- 17 Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
- 18 Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan
- 19 Lahan kritis cukup luas

20 Berbagai potensi wisata budaya dan keindahan alam belum digali, dikembangkan dan dipromosikan secara optimal, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Provinsi Jambi masih kecil.



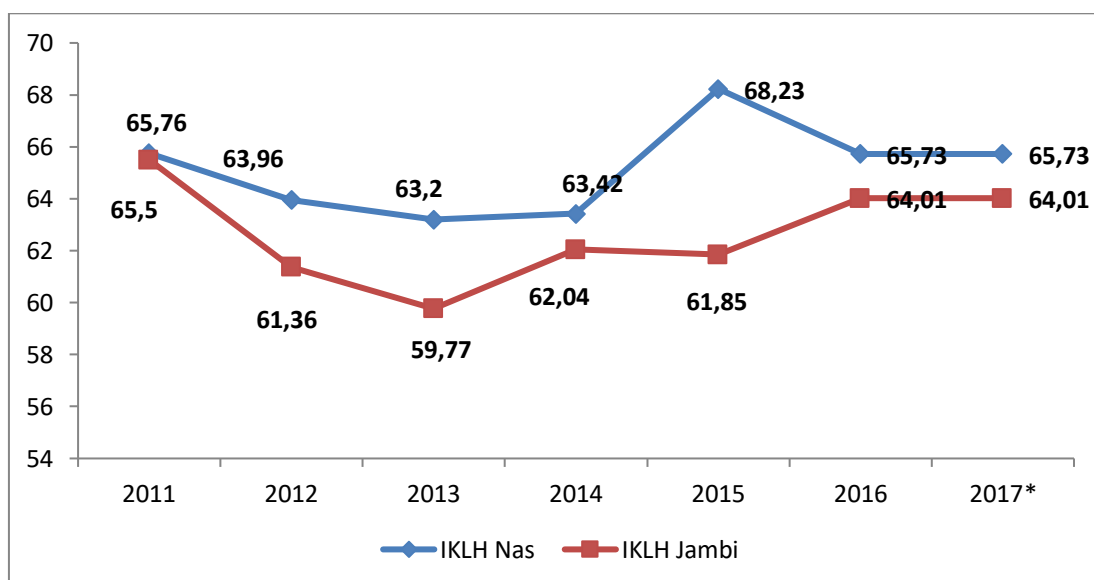
Gambar 4.10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2013-2017 (BPS, 2018)

21 Rasio elektrifikasi Provinsi Jambi masih berada dibawah rasio elektrifikasi nasional karena masih mengandalkan listrik PLN dan belum tereksplorasi nya secara optimal potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat



Gambar 4.11 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2011-2017

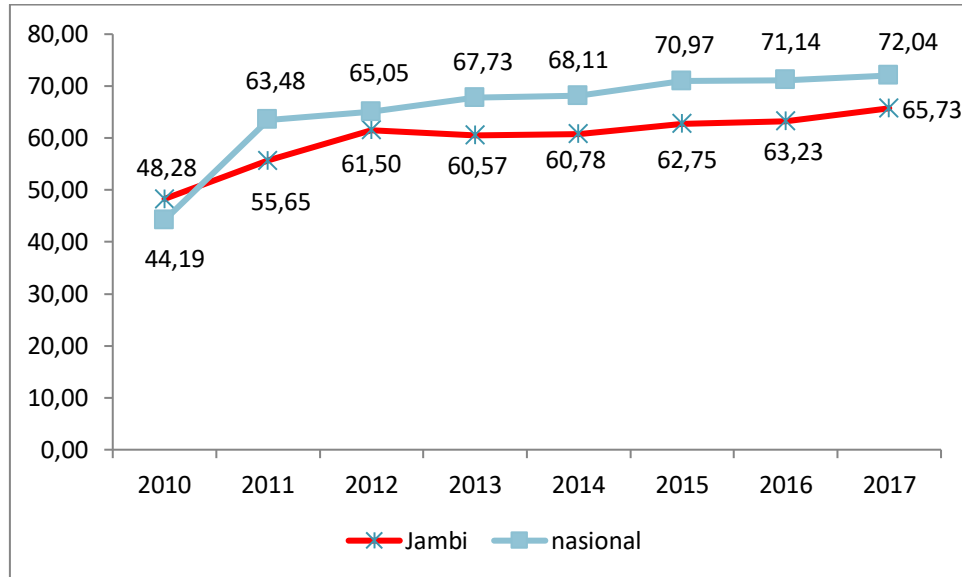
22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang tahun 2011-2017 selalu berada di bawah nasional, walaupun dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh indeks kualitas air yang terus turun hingga tahun 2013 dan baru mulai membaik pada tahun 2014 akibat degradasi lahan, pertambangan ilegal, limbah industri, limbah domestik dan sumber pencemar lainnya, serta kualitas udara yang sangat bergantung dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 4.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2011-2017* (Kemen. LH, 2018)

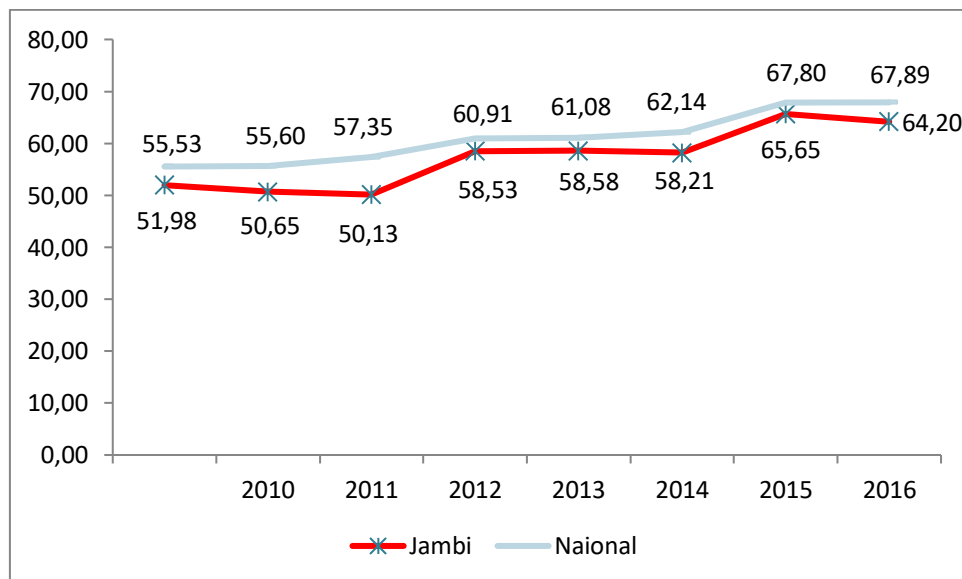
23 Transportasi laut masih sangat terbatas karena belum adanya pelabuhan yang memadai.

24 Penyediaan infrastruktur dan pelayanan air minum belum memadai sehingga proporsi akses terhadap air minum layak Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional.



Gambar 4.13 Proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2010-2017 (BPS, 2018)

25 Sarana prasarana pendukung sanitasi layak masih terbatas sehingga proporsi akses terhadap sanitasi layak masih berada dibawah rata-rata nasional.



Gambar 4.14 Proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi layak Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2010-2017 (BPS, 2018)

26 Pengembangan kawasan strategis masih lambat, khususnya Kawasan Strategis Ujung Jabung.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1 **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya *e-government system* dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
- 2 **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.
- 3 Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
- 4 **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan

inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

- 5 **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
- 6 Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta indeks Gini.
- 7 Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean - China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**
- 8 **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
- 9 Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah **perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal

pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

- 10 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
- 11 **Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal. Provinsi Jambi berbatasan dengan lima Provinsi dan sampai dengan tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang batas antar Provinsi Jambi dengan Provinsi berbatasan yang telah ditetapkan baru mencapai 40% atau 2 Permendagri, sedangkan tiga lainnya sedang dalam proses. Adapun rincian status penyelesaian batas antara Provinsi Jambi dengan provinsi berbatasan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a Batas Jambi-Bengkulu, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2013,
 - b Batas Jambi-Riau, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2013,
 - c Batas Jambi-Sumsel, belum ditetapkan,
 - d Batas Jambi-Sumbar, pada segmen Bungo-Tebo dan Dharmasraya, belum disepakati,
 - e Batas Jambi-Kepri, batas pengelolaan di laut dan belum ditetapkan.